

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun desain penyisihan piutang tidak tertagih yang ideal pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB), khususnya piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA). Hal tersebut dikarenakan peraturan yang diterapkan dalam penyisihan piutang tidak tertagih (PMK 201/2010) tidak relevan dengan karakteristik piutang pada DJMB serta adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai belum dilakukannya penilaian kualitas piutang ada Kementerian/Lembaga (K/L). Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (*research and development*) dengan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis dokumen.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa desain penyisihan piutang tidak tertagih yang ideal pada DJMB ialah membagi kualitas piutang ke dalam 4 golongan yaitu kualitas lancar (0-6 bulan), kualitas kurang lancar (lebih dari 6 bulan-12 bulan), kualitas diragukan (lebih dari 12 bulan-18 bulan), dan kualitas macet (lebih dari 18 bulan). Selanjutnya dengan menggunakan model dari *Leitch* dan *Laminmaki* dihasilkan persentase penyisihan piutang tidak tertagih untuk kualitas lancar sebesar (94%) dan kualitas kurang lancar (96%). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/masukan kepada para pembuat peraturan/kebijakan, khususnya dalam hal piutang, bahwa terdapat perbedaan karakteristik dari masing-masing piutang sehingga tidak bisa dilakukan penyeragaman dalam peraturan.

Kata kunci: penyisihan piutang tidak tertagih, model *Leitch* dan *Laminmaki*, piutang PNBP

## ABSTRACT

This study aims to create the ideal design of allowance for bad debt in the Directorate General of Mineral and Coal (DJMB) in particular Non-Tax State Revenue (PNBP) debts derived from Natural Resources (SDA). It is because the regulation applied in the allowance for bad debt (PMK 201/2010) is not relevant to the characteristics of the debts at DJMB as well as the findings of the Supreme Audit Board regarding the assessment of debt quality in the Ministry/Institution (K/L) which has not been done. The type of this study is research and development using case study approach. The data are collected through document analysis.

The results of this study conclude that the ideal design of allowance for bad debt in DJMB is dividing the quality of debts into 4 groups, namely current (0 – 6 months), substandard (more than 6 months – 12 months), doubtful (more than 12 months – 18 months), and loss (over 18 months). Furthermore, the percentage of allowance for bad debts is obtained for current (94%) and substandard (96%) using Leitch and Laminmaki model. The results of this study are expected to provide information/feedback to regulation/policy makers, especially in terms of debts that there are differences in the characteristics of each debt so that uniformity cannot be done in the regulation.

**Keywords** : allowance for bad debt, Leitch and Laminmaki Model, PNBP debts.